

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Diberlakukannya otonomi daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang otonomi daerah adalah UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004. Menurut Wijaya (2004) pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2002) pemberian otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan bangsa Indonesia.

Sebelum dilaksanakannya otonomi daerah, pajak dan retribusi daerah dikelola oleh pemerintah pusat, sehingga pembagian anggaran dari pemerintah pusat tiap daerah berbeda-beda. Menurut Gideon dan Priyo (2007) menyatakan sebelum diberlakukannya otonomi daerah, perencanaan anggaran pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah pusat dalam memprioritas pembangunan dari tiap-tiap daerah, akibatnya timbul ketimpangan daerah dan perbedaan pembangunan daerah dengan daerah yang lain.

Halim (2007) berpendapat untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Menurut

Ardi (2008) Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada kemajuan di daerah itu.

Widodo (2004) menyatakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD guna menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Halim (2007) menyatakan meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Ardi (2008) menyatakan anggaran sebagai instrument kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio eektivitas, rasio efisien dan keserasian. Dalam penelitian ini kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian dan keserasian. Rasio kemandirian bertujuan untuk mengetahui apakah daerah akan semakin mandiri setelah diberlakukannya otonomi daerah. Dan kinerja keuangan rasio keserasian digunakan untuk melihat apakah daerah tersebut memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam mendukung peningkatan PAD setelah otonomi daerah.

Optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan cara membangun usaha rakyat dengan resiko jangka pendeknya mengurangi pendapatan pajak dan retribusi, tetapi jangka panjangnya akan meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi.

David dan Priyo (2007) menyatakan bahwa usaha untuk meningkatkan PAD tidak

akan berarti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Lilis (2002) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator umum yang dapat menggambarkan kegiatan ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nilai PDRB yang tinggi dengan diikuti pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan perekonomian daerah tersebut semakin membaik.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan peningkatan kinerja dari aparat pemerintah untuk menaikkan PAD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) No 13 Tahun 2000 maka pemerintah daerah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi yang dalam jangka panjang akan meningkatkan PAD. Artinya semakin banyak belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka semakin banyak belanja pegawai untuk mendukung program dan kegiatan tersebut.

Haryadi dan Sudomo (2008) menyatakan fakta sejarah keistimewaan Yogyakarta adalah konsekuensi logis dari keputusan politik dua raja Yogyakarta untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia (RI) dan Keistimewaan Yogyakarta benar-benar diperjuangkan dalam rangka menjadi pilar bagi berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum diberlakukannya otonomi daerah D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang mendapatkan kistimewaan dari pemerintah pusat, keistimewaan yang diberikan adalah mendapat dana alokasi umum yang lebih besar dari daerah lainnya

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, menurut Gideon dan Priyo (2007) bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri termasuk mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Apakah Yogyakarta yang selama ini mendapatkan bantuan dari pemerintah sebelum otonomi daerah dan dapat menggali potensi yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerahnya setelah diberlakukannya otonomi daerah. Dalam penelitian ini mengambil judul tentang "Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pegawai Sebelum dan sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kab/Kota di Prov. D.I. Yogyakarta)".

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. PAD hanya dibatasi dari pendapatan Pajak dan Retribusi.
2. Kinerja keuangan yang digunakan adalah rasio kemandirian dan rasio keserasian.
3. Rasio Kemandirian yang digunakan adalah PAD dibagi dengan Total Pendapatan.
4. Rasio keserasian yang digunakan adalah rasio belanja pembangunan.
5. Struktur APBD sebelum dan sesudah otonomi daerah mengalami perubahan, oleh karena itu rasio belanja pembangunan didapatkan dari

6. Otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kinerja keuangan dengan belanja pegawai?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja pegawai?
3. Apakah terdapat pengaruh antara PAD dengan belanja pegawai?
4. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah?
5. Apakah terdapat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah?
6. Apakah terdapat perbedaan antara PAD sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah.
7. Apakah terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi dan belanja pegawai sebelum dan sesudah otonomi

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara kinerja keuangan dengan belanja pegawai.
2. Untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja pegawai.
3. Untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara PAD dengan belanja pegawai.
4. Untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah.
5. Untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah otonomi daerah.
6. Untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat perbedaan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah.
7. Untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat perbedaan belanja pegawai sebelum dan sesudah otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pengembang teori dan pengetahuan dibidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dan akuntansi keuangan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.
2. Bagi pemerintah daerah, yaitu memberikan kontribusi praktis mengenai pengaruh kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi dan PAD dan belanja pegawai sebelum dan sesudah otonomi daerah